

EFEKTIVITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIMRENDA) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang)

Budhi Setianingsih, Endah Setyowati, Siswidiyanto

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: Budhisetianingsih@gmail.com

Abstrack: *Effectiveness Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Study on Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang). Local development planning is a guideline for the implementation of development and become a benchmark for the success of local development. One important aspect for the success of local development plan is the presence of the institution or working unit as well as the information systems that support. Application based information systems used in local development planning is Simrenda. Simrenda existence is expected to improve the quality of local development planning, so that the realization of development can be achieved optimally. These results indicate that the application of Simrenda still not effective. This is caused by minimum identification of the problems of regional development efforts, the limited ability of human resources in BAPPEDA and the level of people's satisfaction with the results of regional development in the city of Malang are still low.*

Keywords: *effectiveness, sistem perencanaan pembangunan daerah*

Abstrak: **Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang).** Perencanaan pembangunan daerah merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Aplikasi berbasis sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah Simrenda. Keberadaan Simrenda diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, sehingga realisasi pembangunan dapat tercapai secara optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaplikasian Simrenda masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh minimnya upaya identifikasi permasalahan pembangunan daerah, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di BAPPEDA serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah di Kota Malang yang masih rendah.

Kata kunci: efektivitas, sistem perencanaan pembangunan daerah

Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini menandai bahwa terjadi transaksi atau perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya pelimpahan wewenang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa otonomi daerah telah memberikan cara baru dalam proses pemerintahan daerah dengan meletakkan kewenangan dan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah daerah. Kewenangan dan tanggung jawab yang besar ini diharapkan mampu memberikan motivasi yang tinggi dalam meningkatkan potensi daerah masing-masing.

Otonomi daerah juga dapat diartikan sebagai semangat mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih mandiri, baik mandiri secara politik maupun finansial. Pemberian kewenangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya serta memiliki semangat kompetitif yang tinggi dengan daerah lain dalam konteks pembangunan daerah. Pernyataan tersebut relevan dengan pendapat Muluk (2009, h.62) yang mengungkapkan bahwa, otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalistik menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan sebuah instrumen perwujudan kesejahteraan masyarakat daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya daerah yang potensial.

Salah satu aspek penting bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik. Agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka dibentuklah suatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Menurut Soekartawi (1990, h.24) pentingnya aspek perencanaan yang dikaitkan dengan aspek pembangunan dapat diklasifikasikan menjadi dua topik utama yaitu: (1) perencanaan sebagai alat pembangunan; dan (2) perencanaan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pembangunan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan merupakan kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang sistematis dengan melihat kualitas sumber daya yang dimiliki. Berdasarkan pengertian tersebut, Tjokrowinoto (1996, h.92) menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari dua aspek penting, yaitu merupakan kegiatan perumusan rancangan pembangunan dan sebagai proses yang akan menentukan keberhasilan pembangunan.

Pentingnya proses perencanaan pembangunan daerah ini menandakan setiap daerah dituntut untuk dapat meminimalisir kesalahan-kelasahan yang akan terjadi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Setiap daerah memiliki permasalahan atau kendala yang berbeda-beda dalam penyusunan rencana pembangunannya. Hal tersebut menandakan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari isu strategis dan permasalahan khas yang akan dialami oleh pemerintah daerah. Secara umum, Aziz, Supriyono dan Muluk (2013) menjelaskan bahwa permasalahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah masih bersifat top down, pola pemikiran yang cenderung satu arah dan tidak terangkatnya isu-isu strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan beberapa kajian mengenai permasalahan perencanaan pembangunan di atas, maka BAPPEDA sebagai aktor dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi dalam mengangkat isu-isu strategis daerah dan menjadikan proses perencanaan pembangunan tersebut lebih bersifat dinamis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menandakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses utama yang akan menentukan keberhasilan pembangunan, sehingga dalam tah-

apan ini harus dijalankan secara optimal. Optimalisasi perencanaan pembangunan dapat berhasil jika didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten dan data-data statistik yang akurat. Keberadaan data-data statistik yang akurat akan membantu BAPPEDA dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala serta pemikiran ideal yang harus diapresiasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Melalui sistem informasi ini diharapkan arah pembangunan daerah lebih terarah pada kebutuhan riil masyarakat dan bukan hanya bersifat normatif serta lebih menguntungkan salah satu pihak saja. Perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan realitas suatu daerah (Kuncoro, 2012, h.3). Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu instrumen yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (Simrenda). Simrenda merupakan aplikasi untuk membantu menyusun buku Musrenbang, Renja SKPD, RKPD dan KUA dan PPA melalui proses rekapitulasi dan simulasi yang dapat menghasilkan skenario perencanaan anggaran secara optimal. Simrenda ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Salah satu daerah yang memiliki permasalahan mendasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian Aziz, Supriyono dan Muluk (2013) menyatakan bahwa Kota Malang belum holistik dalam proses perencanaan pembangunan, karena belum menjawab kebutuhan masyarakat, belum mempunyai alur perencanaan yang jelas dan tepat sebagaimana mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan RKPD. Selain itu, Aziz, Supriyono dan Muluk (2013) menambahkan, proses perencanaan pembangunan daerah Kota Malang bersifat terlalu hierarkis dan belum dapat mengangkat isu-isu strategis yang muncul di masyarakat. Beberapa bentuk riil dari permasalahan perencanaan pembangunan di Kota Malang adalah permasalahan mengenai pembangunan perumahan dan permukiman serta dampaknya terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Malang.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, BAPPEDA Kota Malang diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memanfaatkan Simrenda yang telah tersedia. Penggunaan sistem informasi ini akan membantu BAPPEDA Kota Malang dalam menjalin hubungan sinergis antar SKPD serta menentukan arah pembangunan yang didasarkan atas prioritas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan kepada BAPPEDA sebagai bahan evaluasi pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Tinjauan Pustaka

1. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nampak bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berhubungan dengan pelayanan dasar. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan sumber daya potensial demi terwujudnya pembangunan daerah yang berasas kepada keadilan dan berawasan lingkungan demi masyarakat yang sejahtera.

2. Otonomi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah diartikan sebagai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan daerahnya sendiri dan kepentingan masyarakatnya dalam tataran sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama dari otonomi daerah pada dasarnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sabarno (2007, h.32) yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan pilihan yang paling tepat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat yang demokratis dalam konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari otonomi daerah

adalah pemberian kewenangan kepada daerah yang diharapkan menjadi tolak awal bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat mengapresiasi kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan umum. Pespektif lain, tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan demi meningkatkan kemandirian baik secara politik maupun fiskal.

3. Efektivitas

Menurut (Effendy 1989, h.14) mendefinisikan efektivitas sebagai komunikasi dimana terdapat suatu tujuan yang harus dicapai dan disesuaikan dengan biaya yang telah ditetapkan, waktu yang telah ditentukan serta jumlah personil yang akan terlibat. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti 1995, h.61). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh prog-ram atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Efektivitas merupakan Pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Handyaningrat, 1995, h.16). Berdasarkan pendapat tersebut maka efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian sebuah tujuan. Dikatakan efektif jika tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi dari perencanaan awal. Oleh karena itu, efektivitas memiliki sejumlah indikator dalam menentukan tingginya pencapaian suatu tujuan.

Adapun menurut Ringkasan Eksekutif Kajian Efektivitas Perencanaan Pembangunan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan (2010) menjelaskan bahwa indikator efektivitas dalam perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Satuan waktu;
2. Satuan hasil;
3. Kualitas kerja; dan
4. Kepuasan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, indikator efektivitas merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan tingkat pencapaian suatu tujuan. Efektif merupakan gambaran bahwa tujuan yang tercapai telah diukur berdasarkan hasil gunanya. Efektif juga sangat erat dengan penyelesaian sebuah permasalahan, oleh karena itu efektivitas terkadang tidak diukur oleh seberapa banyak biaya yang dibutuhkan, namun lebih berfokus pada optimalisasi permasalahan yang dapat terselesaikan.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut (Soekartawi, 1990, h.3) konsep umum tentang perencanaan pembangunan adalah

bahwa perencanaan pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun secara sistematis. Riyadi dan Bratakusuma (2003, h.7) berpendapat, perencanaan pembangunan dapat diartikan proses atau tahap dalam merumuskan pilihan-pilihan pengambilan kebijakan yang tepat, dimana dalam tahapan ini dibutuhkan data dan fakta yang relevan sebagai dasar atau landasan bagi serangkaian alur yang sistematis yang bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum baik secara fisik maupun non fisik.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenda) ini dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui data-data pembangunan yang relevan dan akurat. Simrenda dapat membantu semua tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan Simrenda akan sangat membantu mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maksimal. Melalui beberapa rangkaian simulasi kegiatan, penentuan arah kebijakan pembangunan dapat lebih dimaksimalkan, sehingga upaya-upaya penanganan permasalahan dan hambatan dalam pembangunan daerah mampu diatasi sejak awal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller (dalam Moleong 1996, h.3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Menurut (Zuriah, 2009, h.47) menjelaskan, penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Fokus dalam penelitian ini adalah (1) Efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang, dan (2) Faktor pendukung dan penghambat efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan model Interaktif menurut Miles, Hubberman dan Saldana (2014, h.10). Analisis model intera-

ktif ini melalui 3 tahap yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Malang

a. Satuan Waktu

Perencanaan pembangunan merupakan awal dari proses pembangunan yang memerlukan sasaran waktu yang jelas. Hal ini disebabkan oleh prioritas pembangunan yang mendesak untuk diaktualisasi, sehingga perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap mulai dari satuan pemerintahan terendah hingga ke pemerintah daerah. Upaya-upaya pencegahan dini dimulai dari proses direncanakan, sehingga pembangunan daerah dapat terlaksana secara maksimal dan tepat waktu. Pertimbangan mengenai persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat diharapkan cepat teratasi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Secara umum, penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Kota Malang sudah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini tercermin dari terlaksananya musrenbang yang terlaksana di Bulan Februari 2015 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan forum SKPD sebagai tindak lanjut dari musrenbang tingkat kecamatan telah terlaksana tepat waktu yaitu dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2015.

Sementara itu, terlaksananya kegiatan proses perencanaan pembangunan di Kota Malang tersebut belum tercover secara maksimal oleh Simrenda. Pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Malang yang belum terjadi peningkatan percepatan waktu menandakan bahwa pengaplikasian Simrenda masih terbatas. Hal ini menandakan bahwa keberadaan Simrenda di Kota Malang belum efektif dan belum dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Melalui Simrenda, pelaksanaan perencanaan pembangunan seharusnya dapat terlaksana lebih cepat. Proses perencanaan yang beralih ke model digital berbasis sistem informasi mampu memangkas waktu pelaksanaan perencanaan pembangunan. Secara aktual, manfaat dari Simrenda tersebut belum optimal dan kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Malang masih dilakukan semi manual.

Berdasarkan beberapa pendapat dan data yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa, ketepatan waktu dalam pelaksanaan musrenbang menjadi faktor penting terangkatnya kebutuhan pembangunan masyarakat yang mendesak. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan merupakan cerminan keseriusan aktor pembangunan daerah dalam

menanggapi isu-isu dan persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian disisi lain keberadaan Simrenda di Kota Malang masih belum dapat meningkatkan percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal ini menandakan bahwa Simrenda masih diaplikasikan secara terbatas, sehingga manfaat yang terdapat dalam Simrenda belum dapat dirasakan secara maksimal. Keberhasilan pembangunan daerah juga tidak hanya diukur melalui ketepatan waktu perencanaan, melainkan juga dilihat dari prespektif hasil, baik berupa dokumen perencanaan maupun relevansinya dengan aktualisasi di lapangan.

b. Satuan Hasil

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari proses dari pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan sendiri memuat dua arti utama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan sebagai proses tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Melihat hal ini, maka perencanaan pembangunan dapat dikatakan berhasil jika kedua konteks tersebut dapat terlaksana secara maksimal. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tidak hanya dinilai dari telah tersedianya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, melainkan relevansi dokumen perencanaan terhadap aktualisasi di lapangan.

Ditinjau dari segi hasil dokumen seperti RPJPD, RPJMD dan RPJP, perencanaan pembangunan dapat dikatakan telah terlaksana secara baik. Ketersediaan dokumen perencanaan tersebut menjadi bukti bahwa BAPPEDA Kota Malang telah berupaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Melalui kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Malang melalui BAPPEDA berusaha membuat kerangka kebijakan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, ketersediaan dokumen ini juga merupakan media prefentif dalam menanggulangi adanya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab, penyalahgunaan anggaran dan/atau wewenang, media kesesuaian aktualisasi pembangunan dan penanggulangan ketidakpuasan pembangunan oleh pihak tertentu.

Kemudian apabila ditinjau dari prespektif perencanaan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah, keberadaan Simrenda masih belum efektif. Ketersediaan dokumen perencanaan belum tercover secara maksimal oleh aplikasi Simrenda. Aplikasi Simrenda yang dapat meningkatkan kualitas dokumen perencanaan melalui beberapa simulasi pelaksanaan pembangunan serta kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan masih belum dapat diaplikasikan secara optimal oleh BAPPEDA.

Dilihat dari prespektif perencanaan pembangunan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, peran Simrenda masih belum optimal dalam mengangkat isu-isu strategis daerah ke dalam proses perencanaan pembangunan. Selain itu, respon negatif masyarakat terhadap pembangunan di Kota Malang yang negatif menandakan bahwa realisasi pembangunan di Kota Malang masih belum optimal. Fakta tersebut dibuktikan dengan pembangunan kawasan perbelanjaan, pembangunan kawasan apartemen dan dampaknya terhadap kemacetan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka Simrenda masih belum dapat meningkatkan relevansi perencanaan pembangunan dengan realisasinya di lapangan.

c. Kualitas Kerja

Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah kinerja dari sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur merupakan pilar penting dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang baik, tidak menjadi jaminan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah jika sumber daya aparatur tidak memiliki kredibilitas dan kualitas kerja yang baik. Kualitas kerja sumber daya aparatur pada dasarnya dapat diukur melalui hasil kerja dalam perencanaan pembangunan daerah. Hasil kerja ini selanjutnya dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dapat menggambarkan tingkat capaian atau realisasi kinerja instansi pemerintahan dalam menjalankan tupoksinya. Melalui LAKIP ini dapat dilihat persentase capaian atau realisasi kerja yang disesuaikan dengan visi, misi dan strategi daerah yang telah ditetapkan. Persentase capaian atau realisasi kerja instansi pemerintahan diukur melalui seberapa jauh kegiatan atau program yang telah ditetapkan dengan tingkat realisasinya di lapangan. Pengukuran persentase kinerja juga dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan yang dijalankan dengan visi misi daerah.

Berdasarkan hasil dari LAKIP Kota Malang Tahun 2013 kualitas kerja dari BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan daerah sudah baik. Tingkat keberhasilan perencanaan pembangunan daerah disini dijelaskan dalam Misi 3 RPJMD Kota Malang yaitu mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil dan ekonomis. Di sisi lain, tingkat capaian realisasi BAPPEDA Kota Malang yang tinggi kurang relevan dengan pengaplikasian Simrenda yang masih minim. Pihak BAPPEDA berpendapat bahwa minimnya pengaplikasian Simrenda disebabkan oleh sumber daya aparatur BAPPEDA yang kurang me-

madai. Hal ini juga dapat dibuktikan melalui tidak adanya peningkatan kinerja BAPPEDA sejak adanya aplikasi Simrenda.

d. Kepuasan Masyarakat

Proses perencanaan pembangunan sangat menentukan arah pembangunan ke depan dan tingkat keberhasilannya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara optimal sehingga permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dalam pembangunan dapat dilakukan upaya preventif. Pembangunan yang berhasil juga dapat dicerminkan dari kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan. Masyarakat merupakan aktor evaluator dan monitoring dalam pembangunan daerah. Selain itu, tujuan umum dari pembangunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Hal ini menandakan bahwa masyarakat memiliki peran yang besar dalam proses pembangunan daerah. Selain sebagai obyek pembangunan, masyarakat juga dapat memberikan kontribusinya melalui tanggapan dan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Peran aktif masyarakat ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi kesalahan-kesalahan dalam pembangunan.

Secara normatif, kepuasan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur dari keberhasilan pembangunan daerah. Hasil pengukuran ini selanjutnya dijadikan landasan bagi keberlangsungan pembangunan daerah melalui proses perencanaan. Pihak BAPPEDA menilai bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan daerah sudah baik. Di sisi lain, kepuasan masyarakat terhadap pembangunan di Kota Malang masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari berbagai aksi penolakan masyarakat terhadap hasil pembangunan di Kota Malang yang kurang relevan dengan visi daerah yang berorientasi terhadap masyarakat miskin.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Malang

a. Faktor Pendukung

1) Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang sangat strategis dalam mendorong percepatan pembangunan masyarakat. Melalui sejumlah keunggulan yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, perangkat kelembagaan yang mapan serta kemampuan membuat riset dan kajian, maka perguruan tinggi memiliki peran yang besar sebagai agen pembangunan. Potensi sumberdaya manusia yang berkualitas membuat perguruan

tinggi di daerah mampu mengambil peran penting dalam pembangunan daerah.

Kota Malang mempunyai 62 perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA dalam pengaplikasian Simrenda, keberadaan perguruan tinggi ini dapat membantu BAPPEDA dalam mengatasi masih terbatasnya pengaplikasian Simrenda. Selama ini BAPPEDA berpendapat bahwa aplikasi Simrenda masih terkenda oleh beberapa hambatan, oleh karena itu melalui keberadaan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang berkualitas dan sarana serta prasarana yang mendukung permasalahan dan hambatan dalam pengaplikasian Simrenda dapat diatasi.

2) Sosialisasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Mengetahui adanya perubahan dinamika masyarakat yang cukup pesat, maka pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan potensinya dalam meningkatkan kinerjanya. Menyikapi hal tersebut proses perencanaan pembangunan juga telah ditingkatkan melalui adanya aplikasi berbasis sistem informasi yang disebut dengan Simrenda. Perubahan mengenai perencanaan pembangunan ini juga menuntut adanya perubahan sistem kerja dalam perencanaan pembangunan, sehingga proses peralihan ini membutuhkan adaptasi, bimbingan dan komunikasi antar SKPD. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut adalah diadakannya sosialisasi dan pelatihan Simrenda di Hotel Savana Kota Malang pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Kegiatan sosialisasi Simrenda ini dilaksanakan dengan BAPPEDA dan bagian keuangan selama tiga hari, yang diharapkan dengan adanya sosialisasi ini masing-masing SKPD nantinya dapat mengoperasikan Simrenda dengan maksimal.

b. Faktor Penghambat

1) Profesionalisme Staf

Proses perencanaan pembangunan memuat unsur penting bagi keberhasilan pembangunan di daerah. Pentingnya proses perencanaan pembangunan tersebut memerlukan profesionalisme staf yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa sumber daya aparatur yang dapat mengidentifikasi permasalahan daerah dan dapat menaruhnya ke dalam perencanaan pembangunan daerah secara optimal. Profesionalisme membutuhkan sumber daya aparatur yang berdedikasi tinggi, moralitas yang baik, loyalitas dan mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Selain itu, hambatan dalam proses pengaplikasian Simrenda adalah masih lemahnya profesionalisme pegawai BAPPEDA.

Hal ini dibuktikan dengan Jumlah pegawai yang masih terbatas dan belum adanya sumber daya aparatur fungsional yang memiliki kompetensi di bidang komputer dan sistem informasi.

2) Keterbatasan Anggaran

Permasalahan mendasar yang dialami oleh BAPPEDA Kota Malang dalam pengaplikasian Simrenda ini adalah keterbatasan jumlah anggaran. Keterbatasan anggaran ini disebabkan oleh BAPPEDA yang tidak hanya berfokus pada pengaplikasian Simrenda, melainkan juga proses perencanaan pembangunan lain misalnya pengadaan forum SKPD dan musyawarah musrenbang sebagai upaya tindak lanjut dari proses musrenbang di tingkat kecamatan. Selain itu berdasarkan anggaran belanja langsung BAPPEDA Kota Malang Tahun 2009-2013, BAPPEDA Kota Malang tidak menerima peningkatan anggaran sejak adanya aplikasi Simrenda.

3) Sarana dan Prasarana

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BAPPEDA dalam pengaplikasian Simrenda adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang Simrenda. Secara fisik, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BAPPEDA saat ini memang sudah cukup jika dikaitkan dengan proses perencanaan pembangunan secara manual atau yang tidak berbasis sistem informasi. Hal ini menandakan bahwa perubahan sistem yang ada belum didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai. Oleh karena itu, dapat dikatakan

bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan BAPPEDA kurang maksimal dalam pengaplikasian Simrenda.

3. Kesimpulan

a. Satuan Waktu

Proses pengaplikasian Simrenda di Kota Malang masih belum efektif. Namun ketepatan waktu dalam perencanaan pembangunan masih belum didukung secara maksimal oleh Simrenda dan masih belum mengalami percepatan dari tahun sebelumnya

b. Satuan Hasil

Ditinjau dari perspektif perencanaan pembangunan melalui Simrenda juga belum efektif sehingga pembangunan di Kota Malang masih kurang relevan dengan visi daerah yang berorientasi kepada masyarakat miskin

c. Kualitas Kerja

Berdasarkan LAKIP persentase capaian kerja BAPPEDA dalam pengaplikasian Simrenda masih belum optimal. Hal ini karena keterbatasan pengaplikasian Simrenda yang belum memadai.

d. Kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah di Kota Malang masih rendah karena respon dan aksi yang negatif masyarakat terhadap pembangunan. Hal tersebut menandakan bahwa Simrenda masih belum efektif dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang.

Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul. Supriyono, Bambang dan Muluk, M.R Khairul. (2013) **Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak (Soft System) (Studi Pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang)**. E-journal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Effendy, Onong Uchjana. (1998) **Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik**. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Handyaningrat, Soewarno. (1995) **Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen**. Jakarta, Pt. Gunung Agung.
- Moleong, Lexy J. (1996) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, Remaja Rosdakarya Offset.
- Muluk, M.R Khairul. (2009) **Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah**. Surabaya, ITS Press.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi. (2005) **Perencanaan Pembangunan Daerah**. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabarno, Hari. (2007) **Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Sedarmayanti. (1995) **Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja**. Bandung, Ilham Jaya.
- Soekartawi. (1990) **Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan**. Jakarta, Rajawali Press.
- Tjokrowinoto. (1996) **Pembangunan Dilema dan Tantangannya**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**. Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Zuriah, Nurul. (2009) **Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan**. Jakarta, Bumi Aksara.